

ANALISIS KEBIJAKAN CHINA MEMBATASI KEGIATAN IMPOR BATU BARA AUSTRALIA

Aulia Mantasya¹, Chairul Aftah²✉

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: chairul.aftah@fisip.unmul.ac.id

Article history

Received 2024-02-10 | Accepted 2024-03-16 | Published 2024-05-25

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan China yang menghentikan impor batu bara dari Australia sejak Februari 2021. Pembatasan ini mencakup perpanjangan waktu pemrosesan batu bara dari 25 hari menjadi 40 hari dan pembatasan jumlah tahunan yang dapat diimpor melalui pelabuhan Dalian. Kebijakan ini diduga dipengaruhi oleh keputusan Australia yang mengecualikan Huawei dari jaringan 5G pada Agustus 2020, yang menambah ketegangan antara kedua negara. Ketegangan ini sudah ada sejak 2017, ketika Australia menuduh China ikut campur dalam urusan dalam negerinya. China, sebagai pasar utama ekspor batu bara Australia, mempengaruhi perekonomian Australia yang sangat bergantung pada ekspor tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan. Analisis dilakukan dengan pendekatan Realisme Defensif dan Ofensif, di mana China menggunakan strategi menyeimbangkan kekuatan untuk melindungi kepentingannya, termasuk pengembangan 5G Huawei. Australia, yang mendukung AS, memperburuk hubungan dengan China, yang kemudian memperluas embargo untuk mencakup barang-barang lain seperti anggur dan ternak.

Kata Kunci: Larangan Impor Batubara, Australia, Cina, Huawei 5G, Realisme Defensif dan Ofensif.

ANALYSIS OF CHINA'S POLICY TO LIMIT AUSTRALIA'S COAL IMPORTS

Abstract

This paper analyzes China's policy to halt coal imports from Australia, starting in February 2021. China increased the processing time for coal shipments from 25 to 40 days and limited annual coal imports through Dalian port. The policy is believed to be a response to Australia excluding Huawei from its 5G network in August 2020, amid ongoing tensions since 2017 when Australia accused China of interfering in its internal affairs. China, as Australia's primary coal export destination, significantly impacted Australia's economy. The study uses a descriptive research design and qualitative methodology with secondary data. The rationale behind China's actions is explained through Defensive and Offensive Realism. China, leveraging its power, adopted a balancing strategy to protect its interests, including Huawei's 5G development. Australia's alignment with the US further strained relations, prompting China to extend the embargo to include other Australian goods like wine and cattle.

Keywords: Coal Import Ban, Australia, China, Huawei 5G, Defensive and Offensive Realism

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2024 Aulia Mantasya, Chairul Aftah



Regionalism Global Journal:
Jurnal Penstudi Hubungan Internasional
Vol. 1 | Issue 1 | 2024
Halaman 32-41

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright @ 2024 Aulia Mantasya, Chairul Aftah

1. PENDAHULUAN

Batu bara adalah bahan bakar fosil yang dihasilkan dari batuan sedimen yang terbakar dan merupakan endapan dari akumulasi bahan organik, seperti tumbuhan, selama proses tertentu selama sekitar tiga abad. CNBC Indonesia (2019) melaporkan bahwa, setelah AS, Australia adalah salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Queensland dan New South Wales memiliki banyak endapan batu bara ini. Tempat ini menghasilkan batu bara hitam, yang bagus untuk pembuatan baja. Wilayah ini dapat menghasilkan hingga 85 juta ton batu bara setiap tahunnya. Akibatnya, salah satu sumber pendapatan terbesar Australia adalah ekspor batu bara.

Di tahun 2022, China diperkirakan akan mengonsumsi sekitar 4,2 miliar ton batu bara. Konsumen batu bara terbesar di dunia memainkan peran penting dalam penyediaan energi negara ini, terutama untuk pembangkit listrik dan industri. Tingkat konsumsi batu bara yang tinggi juga dikaitkan dengan upaya China untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat seiring dengan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. China bukan satu-satunya negara yang mengekspor batu bara; itu juga pengimpor. Australia adalah salah satu negara pengekspor batu bara terbesar ke China. Sejak tahun 2009, China adalah eksportir batu bara terbesar di dunia dengan pangsa 9,6 persen dan importir terbesar kedua dengan pangsa 7,9 persen, membuat China menjadi target pasar utama bagi ekspor batu bara Australia. Hubungan bilateral China-Australia, yang telah ada sejak lama, semakin diperkuat dengan perjanjian dagang ChAFTA, yang berlaku sejak 20 Desember 2015.

Namun, China memberlakukan kebijakan yang membatasi impor batu bara Australia pada Februari 2021. Meskipun kebijakan ini tidak benar-benar menghentikan impor batu bara ke China, itu hanya memperlambatnya. Saat ini, proses pengiriman memerlukan 40 hari untuk pemeriksaan, yang biasanya memerlukan 25 hari. Impor batubara Australia dihentikan oleh pejabat bea cukai di pelabuhan utara Dalian, menurut kantor berita Reuters. Impor dibatasi 12 juta ton per tahun melalui Dalian, Bayuquan, Panjin, Dandong, dan Beiliang. Dalian membersihkan hampir enam juta ton batubara pada bulan Januari lalu, menurut seorang pedagang batu bara di Beijing yang berbicara kepada Reuters. Proses clearance batubara telah ditunda sejak akhir 2021, ketika China memperlambat sistem bea cukai untuk mengurangi impor.

Perdana Menteri Australia mengatakan bahwa undang-undang Australia melarang Huawei, perusahaan teknologi komunikasi China, untuk bergabung dengan jaringan 5G negara itu sejak Agustus 2021 karena alasan keamanan. Jaringan 5G berfokus pada perangkat lunak daripada perangkat keras, sehingga penyedia peralatan atau pihak ketiga dengan niat buruk dapat mengakses dan memantau transfer data, melacak lokasi pengguna, atau bahkan menguping pembicaraan telepon. Hubungan antara China dan Australia telah memanas sejak 2017 ketika Canberra menuduh China mencampuri urusan dalam negeri mereka. China mengklaim tindakan Australia terhadap Huawei sebagai "diskriminatif" dan melanggar aturan perdagangan global. Diduga bahwa China membatasi impor batu bara dari Australia sebagai tindak balas atas pelarangan jaringan 5G Huawei di Australia. China, bagaimanapun, menolak tuduhan ini dan mengatakan bahwa mereka memperlambat impor batu bara untuk mendorong pengembangan batu bara di negara mereka sendiri, mengurangi polusi udara, dan mempertahankan hak-hak yang sudah ada.

Banyak pedagang batu bara dari berbagai perusahaan beralih ke impor batu bara mereka ke negara lain seperti Rusia dan Indonesia karena hambatan impor yang tidak dapat diprediksi ini. Karena China adalah pasar ekspor terbesar, pembatasan impor batu bara China sangat berdampak pada Australia. China memiliki kekuatan struktural yang signifikan yang memengaruhi banyak negara, dan memengaruhi politik dan ekonomi global. Menurut Susan Strange (2008:25), kekuatan struktural adalah kemampuan untuk menentukan bagaimana sesuatu harus dilakukan dan membentuk kerangka kerja di mana negara dapat berhubungan dengan orang dan organisasi.

Setelah memberhentikan impor batu bara dari Australia pada tahun 2020, China mulai kembali menerimanya pada awal Januari 2024. Karena ketegangan diplomatik antara keduanya, tindakan

ini dipicu oleh larangan tidak resmi China terhadap beberapa barang impor Australia, termasuk batu bara. Namun, setelah empat tahun, China mulai melonggarkan larangan tersebut dan mengimpor batu bara dari Australia untuk menjaga pasokan energi dan mengurangi ketegangan perdagangan. Salah satu faktor yang menyebabkan ketegangan ini adalah permintaan Australia pada tahun 2020 untuk penyelidikan global tentang asal-usul COVID-19—yang dianggap oleh China sebagai penghinaan terhadap reputasinya. China menanggapi dengan memberlakukan beberapa pembatasan impor terhadap Australia, termasuk batu bara.

Realisme Defensif

Karena "Teori Politik Internasional" Kenneth Waltz, teori Realisme Defensif dan Ofensif—yang masing-masing dikembangkan oleh John H. Mearsheimer dan ditulis oleh Kenneth Waltz—secara umum berpendapat bahwa dunia internasional berada dalam struktur atau sistem yang anarkis. Karena kebijakan luar negeri dapat memengaruhi keamanan dan kelangsungan hidup negara, kaum realis cenderung melihat kebijakan luar negeri sebagai komponen yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara. Menurut Machiavelli, keberhasilan seorang pembuat kebijakan menentukan tata negara, termasuk pengakuan politik internasional. Dalam situasi ini, ada gagasan bahwa China menghentikan impor batu bara sebagai tanggapan atas kecaman dan untuk mempertahankan kepentingannya dalam kasus 5G Huawei di Australia. Waltz menyatakan dalam buku *Theories of International Relations* yang ditulis oleh Scott Burchill (2005) bahwa politik internasional terdiri dari sejumlah kelompok yang melakukan aktivitas yang hampir identik, yang berarti nasib kelompok tersebut ditentukan oleh takdir dan kemampuan mereka.

Realisme Defensif berusaha menjelaskan kebijakan luar negeri tertentu dan menghasilkan implikasinya terhadap dinamika politik antar negara dengan menggabungkan berbagai elemen. Teori ini juga berfokus pada pengaruh struktur terhadap kebijakan luar negeri dengan berbagai asumsi tentang perilaku umum suatu negara. Dua subteori baru muncul dari ide dasar Realisme Defensif. Seperti yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya, teori Waltz dari Realisme Defensif berpendapat bahwa, daripada memaksimalkan kekuatan, fokus Realisme Defensif pada upaya suatu negara untuk mencapai keseimbangan kekuatan dengan negara lain dalam dunia yang anarkis. Dalam situasi seperti ini, negara diharapkan menemukan cara untuk mempertahankan diri tanpa mengancam negara lain atau menunjukkan keinginan damai mereka; pada akhirnya, ini dapat menghasilkan perdamaian yang lebih besar dalam sistem internasional daripada yang diantisipasi oleh para teoritis realis sebelumnya.

Realisme Ofensif

Selanjutnya, Mearsheimer mengadopsi prinsip-prinsip dasar Neorealisme dan memasukkan Realisme Ofensif—ideologi yang agak berbeda dari Waltz—dalam bukunya *The Tragedy of Great Power Politics* (2001). Mearsheimer menekankan bahwa negara-negara hegemon cenderung mencari peluang untuk meningkatkan kekuasaan mereka. Menurut Realisme Ofensif, perilaku negara ditentukan oleh sistem internasional, di mana elemen struktural seperti distribusi kekuasaan dan anarki memainkan peran paling penting dalam menjelaskan politik internasional (Mearsheimer, 2001).

Penulis akan menyelidiki bagaimana pemikiran para pemimpin negara dari berbagai ideologi memengaruhi kebijakan. Setiap negara memiliki keinginan untuk mengontrol negara lain, seperti individu. Sebagaimana dijelaskan di halaman sebelumnya, peristiwa yang menarik perhatian penulis sebelum penerapan kebijakan ini adalah pelarangan Huawei 5G China di Australia. Ini berkontribusi pada peningkatan hubungan antara China dan Australia. Kepentingan nasional adalah komponen utama, menurut teori yang dibahas. Menurut kaum realis, negara akan menghadapi tantangan eksternal seperti ketidaksepakatan politik. Pemimpin akan memanfaatkan kekuatan mereka untuk membuat kebijakan. Seperti yang disebutkan Waltz, negara memiliki dua cara untuk mencapai kepentingannya secara struktural: *Bandwagoning* dan *Balancing*. Sementara itu, Mearsheimer menawarkan dua cara: *Buck Passing* dan *Balancing*, seperti yang disebutkan Waltz., Penulis berpendapat dalam hal ini bahwa perekonomian Australia dipengaruhi secara tidak

langsung oleh kebijakan China. Perjanjian ChAFTA yang disahkan pada 2015 menjadikan China sebagai pasar utama Australia dengan mengurangi persentase ekspor batu bara ke negara lain selain China. Akibatnya, Australia kehilangan pasar utamanya ketika China menghentikan impor batu bara dari Australia, yang mengganggu perekonomian. Ini sangat penting karena ekspor impor merupakan salah satu bagian terbesar dari pendapatan Australia, dan batu bara adalah salah satu produk ekspor utama Australia setelah bijih besi. Situasi ini dimanfaatkan oleh China untuk melindungi kepentingan nasionalnya, seperti memberikan izin kepada Huawei untuk mengembangkan 5G.

2. METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanatif kualitatif, dan pendekatan yang digunakan adalah analisis pengambilan keputusan. Tujuan penelitian tentang pengambilan keputusan adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana seseorang, kelompok, atau organisasi membuat keputusan. Penelitian ini berfokus pada negara, terutama China dan Australia. Penulis ingin menganalisis faktor kebijakan China yang membatasi impor batu bara Australia dari tahun 2021–2023. Data sekunder yang diperoleh tidak langsung dari objek penelitian digunakan dalam penelitian ini. Penulis akan menggunakan banyak literatur, seperti buku, Google Books, jurnal, dan situs web resmi yang dapat diandalkan, selama proses pengumpulan data. Data akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah data dikumpulkan, penulis akan memprosesnya dengan membaginya menjadi subtopik, memilah informasi yang relevan, menampilkan informasi, dan kemudian menyusun kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan China Membatasi Kegiatan Impor Batu Bara Australia

Alasan China Membatasi Impor Batu Bara dari Australia

Huawei hampir melampaui Apple sebagai merek smartphone terbesar kedua di dunia pada tahun 2017. Huawei, yang berbasis di Shenzhen, China, menyediakan produknya untuk pasar domestik dan internasional. Huawei dianggap berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan dan penyebaran teknologi 5G secara global. Selain dominasinya di China, perusahaan ini telah menjalin kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi di Asia dan Eropa. Namun, banyak negara di seluruh dunia mulai merespon peningkatan peran Huawei sebagai pencipta standar teknis untuk 5G.

Amerika Serikat melarang Huawei, dan Australia kemudian mengikuti. Karena kebijakan awal Presiden Trump yang melarang Huawei bekerja sama dengan perusahaan di AS seperti Google, Qualcomm, dan Intel, Huawei tidak dapat menggunakan aplikasi atau perangkat lunak mereka. Hal ini memaksa perusahaan telekomunikasi untuk mengubah taktik pemasaran dan strategi smartphone mereka. Pada Agustus 2020, Australia juga melarang Huawei karena masalah keamanan, seperti AS dan negara lain. Pemerintah federal Australia mengirim email yang menyatakan bahwa keterlibatan bisnis apa pun "yang kemungkinan besar akan tunduk pada perintah ilegal dari pemerintah asing yang bertentangan dengan hukum Australia" sangat berbahaya, menurut laporan media Reuters. Pernyataan tersebut memang ditujukan kepada perusahaan telekomunikasi China Huawei, meskipun tidak secara langsung menyebutnya.

Pemerintah Australia menyatakan bahwa, meskipun kontrol keamanan saat ini dilindungi, jaringan baru yang lebih kompleks akan membuat perlindungan model 5G saat ini tidak efektif. Kekhawatiran utama adalah kemampuan telekomunikasi untuk secara diam-diam meretas data pribadi dan mengakses perangkat apa pun melalui sinyal. Huawei membantah tuduhan tersebut, tetapi Kementerian Luar Negeri China meminta pemerintah Australia "untuk meninggalkan prasangka ideologis dan menyediakan lingkungan persaingan yang adil bagi perusahaan China." Pemerintah China menanggapi tuduhan ini dalam konferensi pers. Huawei menyatakan di laman resminya bahwa mereka adalah perusahaan swasta dengan hanya karyawan dan tidak ada pihak ketiga, termasuk pemerintah China, yang memiliki saham di dalamnya. Huawei juga menegaskan

bahwa hukum China tidak memungkinkan pemerintah memaksa perusahaan telekomunikasi untuk melakukan tindakan yang membahayakan alat telekomunikasi negara atau merugikan pelanggan. Namun, negara-negara yang menentang Huawei, termasuk Australia, mengatakan bahwa hukum China masih tidak jelas atau tidak jelas. Selain itu, ada beberapa fakta menarik tentang Ren Zhengfei, pendiri Huawei. Ren sebelumnya bekerja untuk perusahaan milik negara, Huawei didirikan pada tahun 1987. Dia juga menjadi direktur Akademi Teknik Informasi Departemen Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Selain itu, Sun Yafang, mantan CEO Huawei, dikabarkan pernah bekerja dengan Kementerian Keamanan Negara China, yang memungkinkan dia menggunakan posisinya untuk menangani masalah keuangan. Karena tidak ada transparansi tentang latar belakang para pemimpin Huawei, masyarakat menjadi lebih cemas.

Dalam kasus Huawei pada tahun 2020, keputusan Australia didorong oleh analisis mendalam terhadap Undang-Undang Intelijen Nasional China tahun 2019— meskipun tuduhan terhadap perusahaan tersebut didasarkan pada spekulasi dan belum ada bukti nyata yang mengonfirmasi tuduhan tersebut. “Organisasi dan warga negara harus, sesuai dengan hukum, mendukung, bekerja sama dengan, dan berkolaborasi dalam pekerjaan intelijen nasional serta menjaga kerahasiaan kerja intelijennya yang mereka ketahui,” seperti yang diwajibkan oleh hukum. Australia adalah salah satu negara yang menentang Huawei dan percaya undang-undang itu berbahaya karena memaksa orang dan organisasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan intelijen yang mendukung pengumpulan informasi dengan biaya yang jelas untuk bisnis, reputasi mereka, dan akses mereka ke pasar internasional.

Menurut Uren & Cave (2018), ada beberapa alasan penting mengapa Australia melarang Huawei. Pertama, keputusan yang dibuat bukanlah keputusan politik semata, dan masalah ini bukan masalah kecil. Pemerintah Australia juga dipaksa untuk menangani sejumlah masalah yang tumpang tindih dan mendesak yang berkaitan dengan dunia maya dan keamanan nasional. Keputusan ini semata-mata untuk melindungi kepentingan Australia, kata Menteri Luar Negeri Marise Payne. Kedua, perusahaan China berusaha untuk berkembang di pasar global karena Undang-Undang Intelijen Nasional China 2021. Ketika perusahaan asing terlibat dalam proyek infrastruktur penting, sulit bagi pembuat kebijakan untuk mendukung perusahaan yang perilaku internasionalnya terikat oleh undang-undang keamanan domestik.

Model Realisme Ofensif dalam Memaksimalkan Kekuatan China untuk Menjadi Penguasa Tunggal dengan Pengembangan 5G Huawei

Menurut Realisme Ofensif, orang berusaha mempertahankan kepentingan negara lain. Untuk melakukannya, dua strategi utama digunakan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Pertama adalah *Balancing*, dan kedua adalah *Buck Passing*. *Balancing*: Negara yang merasa terancam dapat menggunakan sumber daya yang signifikan untuk mencapai tujuan dan kepentingannya kembali. Dalam strategi ini, negara yang merasa kepentingannya terancam mencoba membuat negara lain memikul beban untuk menghalangi atau mengalahkan negara yang mengancam, selain meningkatkan kekuatan militernya. Negara hegemon tidak terlibat dalam konflik secara langsung; sebaliknya, mereka mendorong negara lain untuk menghadapi ancaman tersebut. Negara-negara menggunakan taktik-taktik realis ofensif di atas untuk memaksimalkan kekuatan mereka dan mempertahankan posisi mereka di lingkungan internasional. Contoh nyata adalah persaingan antara China dan Amerika Serikat dalam pengembangan teknologi 5G, di mana China melalui Huawei berusaha memimpin inovasi dan memaksimalkan kekuasaannya di dunia. Dukungan pemerintah dan investasi besar dalam infrastruktur menunjukkan kesiapan China untuk menjadi pemimpin dunia dalam jaringan 5G, yang diharapkan menghasilkan keuntungan ekonomi dan meningkatkan pengaruh globalnya. Mearsheimer menyatakan bahwa dalam sistem anarki, negara memaksimalkan kekuatan mereka terhadap negara lain. Hal ini memicu perlombaan senjata dan persaingan teknologi militer. Pengembangan jaringan 5G menjadi sangat penting bagi China, tetapi menghadapi penolakan dari negara seperti AS dan Australia. Penolakan terhadap Huawei di Australia, berdasarkan tulisan Greg Austin di *The Strategist*, kurang didasarkan pada bukti yang

kuat dan lebih karena tekanan dari AS. Hal ini memicu ketegangan antara China dan Australia, termasuk pembatasan impor batu bara Australia oleh China. Dalam pandangan Neorealis, ini mencerminkan dilema keamanan di mana negara merasa perlu meningkatkan kekuatan untuk keamanan. China telah melakukan investasi besar dalam infrastruktur 5G, melibatkan pemerintah dan industri untuk memastikan dominasi teknologi ini. Pada tahun 2023, China mengalokasikan 57% dari \$256 miliar untuk teknologi 5G, menunjukkan komitmen besar dalam menguasai pasar dan meningkatkan kekuatannya di arena global (Kania E. B., 2019). Dengan menjadi penggerak utama dalam pembangunan inovasi 5G, China dapat melampaui ketertinggalannya dari jaringan 3G dan 4G sebelumnya dan melampaui AS. Prinsip utama para tokoh realis adalah memaksimalkan keuntungan dengan menekan kerugian seminimal mungkin. Untuk menjadi negara superpower, China harus memperkuat ekonomi dan militernya. Dengan demikian, pengembangan jaringan 5G merupakan paket lengkap yang mendorong kemajuan ekonomi sekaligus mendukung aplikasi militer, memberikan kemampuan untuk berbagi data yang lebih baik, aksi komando dan kontrol yang lebih cepat, dan konstruksi sistem yang memenuhi persyaratan operasional masa depan, seperti internet militer. Dengan demikian, dukungan penuh China terhadap pengembangan jaringan 5G bertujuan untuk mendukung kemajuan bidang militer. Tidak mengherankan jika 5G dianggap sebagai "perlombaan senjata" antara China dan Amerika Serikat. Negara-negara yang memiliki jaringan 5G yang paling kuat di abad ini akan unggul dalam bidang ekonomi, intelijen, dan militer. Berubah dari "factory of the world" menjadi pusat inovasi juga merupakan agenda politik China. Menurut Mariani dan Bertolini (2019), kemenangan dalam persaingan 5G memiliki konsekuensi politik yang signifikan selain kesuksesan ekonomi dan militer.

Model Realisme Defensif dalam Mempertahankan Kepentingan China

Penulis akan lebih berkonsentrasi pada model Realisme Defensif yang diusulkan Waltz pada bagian ini. Karena sifat kompetitif sistem internasional, suatu negara selalu mempertimbangkan tujuan dan niat negara lain saat menghadapi "ketidakpastian". Untuk bertahan dalam sistem anarkis, bukan untuk memaksimalkan kekuasaan, menurut Realisme Defensif Waltz (1979: 126). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar negara yang terus berjuang tidak berusaha untuk menjadi lebih kuat. Sebaliknya, mereka mungkin berusaha melemahkan negara lain agar menjadi bagian dari sistem yang dapat membuat mereka lebih sulit. Negara juga dapat mencapai tujuannya dalam dua cara. Menurut Waltz (1979:118), satu cara adalah melalui usaha internal, yang mencakup peningkatan ekonomi, kekuatan militer, dan pengembangan strategi yang cerdas. Cara kedua adalah melalui usaha eksternal, yang mencakup memperkuat aliansi atau melemahkan lawan (Waltz, 1979).

Waltz menyebutkan dua pendekatan untuk bertahan hidup dalam sistem internasional: bandwagoning dan balancing. Bandwagoning adalah upaya suatu negara untuk menyeimbangkan kekuasaan dengan lawan untuk bertahan hidup dalam sistem, sedangkan balancing adalah upaya sebuah negara untuk membentuk koalisi dengan sebuah negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar untuk memaksimalkan kekuatan dan bertahan dalam sistem. Dalam studi kasus ini, penulis mungkin telah melihat upaya China untuk menyeimbangkan. Hal ini ditunjukkan oleh upaya China untuk mempertahankan jaringan 5G di Australia.

Program Pengurangan Batu Bara di China

Setelah China bangkit pada abad ke-21, banyak orang berspekulasi tentang statusnya sebagai kekuatan besar yang akan bersaing dengan negara seperti AS dalam hal politik, militer, dan ekonomi. Kebangkitan ekonomi China terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pada tahun 1978, China adalah ekonomi terbesar kesepuluh di dunia, tetapi pada tahun 2005, dengan PDB \$2,2 triliun, menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Lebih dari 800 juta orang telah keluar dari kemiskinan berkat pertumbuhan PDB hampir 10% per tahun. China adalah produsen dan konsumen batu bara terbesar di dunia dalam bidang pertambangan. China masih menjadi negara pengekspor dan pengimpor batu bara pada tahun 2007. Namun, ekspor batu bara China menurun drastis sejak tahun 2005, sementara impor terus meningkat dari tahun 2005 hingga 2013.

Eksportnya hanya mencapai 8,17 juta ton pada tahun 2017, turun 7% dari tahun sebelumnya (CNCA, 2018). China mengimpor lebih dari 100 juta ton batu bara pada tahun 2009 dan menjadi pengimpor terbesar di dunia pada tahun 2011. Impor mencapai 200 juta ton pada tahun 2012 dan 327 juta ton pada tahun 2013, masing-masing mewakili 6,8% dari konsumsi dalam negeri. Namun, pada tahun 2017, impor tetap tinggi, mencapai 271 juta ton. Konsumsi batu bara China menurun sebesar 3,5% pada tahun 2015 dan 4,7% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi, restrukturisasi ekonomi (new normal era), dan upaya untuk meningkatkan kualitas udara dan melawan perubahan iklim (Xianbing Liu, 2019).

Mengingat kelebihan kapasitas tenaga batu bara, Administrasi Tenaga Listrik Nasional memperkirakan kenaikan konsumsi listrik akan melambat menjadi sekitar 3,6 hingga 4 persen dari tahun 2016 hingga 2020 dibandingkan dengan 12 persen pada tahun 2011. Untuk mengurangi penggunaan batu bara, kebijakan baru-baru ini menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara baru dan mengurangi kelebihan kapasitas. 1,95 miliar ton, atau 51,3% dari 3,79 miliar ton yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara, digunakan pada tahun 2017 (NDRC dan NEA, 2016).

National Energy Administration (NEA) dan National Development and Reform Commission (NDRC) mengumumkan tujuan pada tahun 2016 untuk menurunkan persentase batubara dalam total konsumsi energi dari 64% pada 2015 menjadi tidak lebih dari 58% pada tahun 2020. Pada tahun 2020, mereka berharap bahwa energi non-fosil akan menyumbang sekitar 15% dari total dan bahwa gas alam akan mencakup 10%. Proporsi batubara turun menjadi 8% pada 2017, 60,4% pada 2017, dan 62% pada 2016. Pada Januari 2017, hingga 101 proyek pembangkit listrik batubara dihentikan untuk mematuhi pedoman ini. Kebijakan China melarang impor batubara dari Australia mengakibatkan penurunan konsumsi bahan bakar fosil dan peningkatan kualitas udara.

Menurut paham Waltz, dunia saat ini berada dalam sistem anarkis di mana keamanan negara tidak terjamin, sehingga keamanan menjadi tujuan tertinggi karena adanya rasa tidak percaya satu sama lain dan ketidakpastian terhadap tujuan negara lain. Dalam situasi ini, China menggunakan kekuatan politiknya untuk menanggapi tindakan Australia; nasib China bergantung pada tanggapannya terhadap pelarangan Australia terhadap program unggulan mereka, yang menunjukkan bahwa nasib sebuah negara dapat bergantung pada tanggapan sebuah negara terhadap tindakan negara lain. Ini menyebabkan perlombaan senjata dan perlombaan militer dan teknologi, bukan untuk memaksimalkan kekuatan, tetapi untuk menyeimbangkan dan mempertahankan posisi mereka sesuai dengan tujuan awal. China masih mengimpor batu bara dari Indonesia dan negara lain, meskipun penghentian impor batu bara Australia membantu program udara bersih China. Ini menunjukkan bahwa fenomena politik memengaruhi kebijakan China (Liu & Hao, 2014).

Larangan impor batu bara China terhadap Australia dianggap sebagai upaya China untuk menyeimbangkan kekuatan politik internasional, terutama sebagai tanggapan terhadap larangan Australia terhadap Huawei. China memperingatkan bahwa larangan Australia terhadap Huawei dapat memperburuk hubungan dagang kedua negara, yang sekarang terbukti benar. Hal ini sesuai dengan keyakinan China, menurut Lampton (2014), yang lebih mengutamakan kontrol ekonomi dan diplomatik daripada kekerasan.

China menyeimbangkan kekuasaan terhadap Australia dengan menggunakan kekuatan ekonominya. Survei pendapat tahun 2011 menemukan bahwa 75% warga Australia setuju bahwa pertumbuhan ekonomi China menguntungkan Australia, dan lebih dari 65% percaya bahwa perjanjian perdagangan bebas dengan China akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup. Sekitar 75% anggota parlemen percaya bahwa peningkatan ekspor ke China akan sangat memengaruhi karakter masa depan. Dalam hal ini, China menggunakan posisinya yang kuat terhadap ekonomi Australia untuk memengaruhi keputusan Australia tentang pelarangan Huawei. Tujuan tindakan China adalah untuk meyakinkan pemerintah Australia tentang kekuatan ekonomi China yang besar. Menurut teori Waltz, sifat anarkis sistem internasional, di mana negara-negara

berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan demi keamanan dan kepentingan nasional mereka, mendorong tindakan ini.

Penyelidikan Wabah China

Dunia dihebohkan oleh wabah di Wuhan, Hubei, China, pada Desember 2019. Diduga berasal dari pasar lokal, wabah ini dapat menyerang manusia dan hewan. Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang berbeda, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. Penyakit ini hampir mirip dengan SARS, tetapi menyebar lebih cepat. Akibat penyebaran yang cepat, banyak negara menghentikan dan menunda berbagai aktivitas, termasuk ekspor impor, untuk mencegah keadaan semakin parah. Kasus pertama COVID-19 terjadi pada 17 November 2019, dengan seorang pria berusia 55 tahun dari provinsi Hubei, menurut The Guardian (2020). Satu hingga lima kasus baru dilaporkan setiap bulan, dan pada 20 Desember, 60 kasus telah dikonfirmasi. WHO melaporkan lebih dari 12 juta kasus COVID-19 dan lebih dari 500 ribu kematian hingga 12 Juli 2020.

Konflik tentang asal-usul virus COVID-19 masih berlanjut meskipun kemajuan dalam pengobatan virus tersebut dilakukan secara global. China dan Amerika Serikat bertengkar tentang sumber virus pada tahun 2020, dengan Trump menuduh China tidak transparan. Ini menyebabkan mosi yang mendorong penyelidikan ulang sumber wabah COVID-19, yang didukung oleh 122 negara, termasuk Uni Eropa, Inggris, Rusia, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Mosi tersebut meminta WHO untuk melakukan penyelidikan independen dan menyeluruh atas penanganan COVID-19. Perwakilan Australia untuk investigasi independen Dr. Leendertz menekankan bahwa tujuan penyelidikan ini bukan untuk menuduh negara tertentu, tetapi untuk mengetahui kapan virus mulai menyebar dan apakah Wuhan adalah pusat awal penyebaran (BBC News, 2020).

Pada April 2020, Marise Payne, Menteri Luar Negeri Australia, menyatakan bahwa Australia akan mendukung penyelidikan independen internasional tentang pandemi COVID-19. China sangat kecewa karena Australia menjadi sponsor utama penyelidikan ini. China dan Australia memiliki hubungan yang sudah tegang, dan China memperingatkan bahwa tindakan Australia dapat berdampak pada hubungan perdagangan bilateral. Namun, China berharap hubungannya dengan Korea Utara bisa mencapai titik tengah dan meningkatkan kepercayaan satu sama lain untuk hasil yang menguntungkan (Bloomberg, 2020).

Pada Mei 2020, ketegangan antara Australia dan China meningkat karena Australia menuntut penyelidikan kasus COVID-19. China memberlakukan tarif bea masuk anti-dumping 80% untuk jelai Australia selama 5 tahun, mulai 19 Mei 2020. Setelah itu, China juga memboikot ekspor daging sapi Australia. Produk dari perusahaan Kilcoy Pastoral Company, Beef City, Dinmore, dan Northern Cooperative Meat Company termasuk di antaranya. Sebagai tanggapan, Australia melaporkan China ke WTO karena negara tersebut melanggar perjanjian perdagangan mereka.

Dalam hal ini, tindakan Australia tidak menunjukkan niat yang baik untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan China. Australia justru mendukung penuh penyelidikan, meskipun China menolaknya. Waltz menyatakan bahwa negara yang lebih kuat akan mempertahankan kepentingannya, sementara negara yang lebih lemah akan mencari kolaborasi yang lebih kuat untuk mengalahkan musuh mereka. Ini ditunjukkan oleh upaya Australia untuk meminta protes ke WTO terhadap tindakan China. Sebaliknya, hubungan diplomatik kedua negara semakin tegang karena China, yang memiliki kekuatan lebih besar, terus mempertahankan kepentingannya. China mungkin terus memboikot batu bara Australia dan produk lain seperti daging sapi karena kasus COVID-19 ini dapat memperburuk keadaan. Tindakan yang lebih keras mungkin terjadi jika Australia terus bertindak seolah-olah menentang China, terutama mengingat China telah menggunakan pemaksaan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

4. KESIMPULAN

Selama bertahun-tahun, China dan Australia telah menjalin hubungan bilateral dalam bidang ekonomi dan bidang lain, seperti pendidikan. Kedua negara memiliki potensi besar untuk saling

menguntungkan, seperti yang ditunjukkan oleh hubungan yang semakin baik seiring waktu. Perjanjian perdagangan bebas China-Australia (ChAFTA), yang disahkan pada Juni 2015 dan dimulai pada Desember 2015, merupakan salah satu manifestasi nyata dari hubungan ini. Perjanjian ini menunjukkan bahwa kedua negara berkomitmen untuk mempermudah transaksi ekspor-impor. Namun, kedua negara sering menghadapi kesulitan untuk menerapkannya saat bekerja sama. Pada tahun 2021-2023, keharmonisan hubungan China-Australia menurun. Dengan menggunakan realisme ofensif dan defensif, penelitian ini menekankan elemen-elemen yang mempengaruhi penghentian tiba-tiba ekspor batu bara Australia ke China. Tiga kasus utama yang diambil adalah pelarangan pengembangan 5G Huawei di Australia, pengurangan konsumsi batu bara China, dan penyeruan penyelidikan wabah COVID-19 Australia. Hubungan kedua negara telah renggang sebelum penghentian ekspor batu bara karena pelarangan pengembangan 5G Huawei di Australia. Ini dianggap sebagai bagian penting dari kebijakan untuk melarang ekspor batu bara. Menurut Realisme Ofensif, China sangat tertarik untuk mengembangkan 5G Huawei untuk memperkuat posisinya dalam sistem global. Kedua, China mengurangi penggunaan batu bara. Pemerintah negara itu bertujuan untuk mengurangi polusi udara pada tahun 2023. Sebagian besar pembangkit listrik China menggunakan batu bara, yang menyebabkan polusi yang signifikan. Dalam kasus ketiga, China marah atas permintaan Australia untuk investigasi COVID-19. Selain itu, karena Australia mendukung AS dalam sengketa Laut China Selatan, China memboikot produk Australia seperti daging sapi, jelai, dan kacang-kacangan. China, sebagai kekuatan yang lebih besar, menggunakan strategi perimbangan kekuatan untuk mempertahankan kepentingannya, seperti yang dilakukannya dengan pengembangan 5G Huawei. Karena China adalah pasar ekspor utama berbagai komoditas Australia, Australia mengalami tekanan karena penghentian ekspor batu bara. Dalam kasus terakhir, Australia tidak menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungan, malah menyebabkan masalah baru dengan mendukung AS, yang menyebabkan China memboikot produk lain seperti anggur dan daging sapi. Hubungan menjadi lebih buruk, dan penghentian ekspor batu bara diperkirakan akan berlangsung lama.

DAFTAR PUSTAKA

- ABC News (20 Mei 2020). Memulai perselisihan dengan China mengenai investigasi COVID-19, apakah itu terlalu sulit? Diambil dari [abc.net.au](https://www.abc.net.au/news/2020-05-20/wha-passes-coronavirus-investigation-australia-what-cost/12265896) pada tanggal 20 Maret 2021: <https://www.abc.net.au/news/2020-05-20/wha-passes-coronavirus-investigation-australia-what-cost/12265896>.
- BBC News (25 Juli 2020). Apa posisi Australia? Dilema Selat China: Australia menyatakan bahwa tuduhan Beijing tidak memiliki dasar hukum, menurut Komite Hubungan Luar Negeri (2021, 11 Juni). <https://www.bbc.com/news/world-australia-53536173>. Sumber konflik global dapat ditemukan di <https://microsites-live-backend.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea>. Bloomberg (2020, 19 Mei). Menurut Economics, China mempertimbangkan untuk menyebabkan lebih banyak penderitaan ekonomi bagi Australia sebagai akibat dari pandemi virus COVID-19.
- Burchil, S. Teori Hubungan Internasional, Houndmills: MACMILLAN, 2005.
- Choudhury, S. R. (28 Maret 2019). Turnbull, mantan PM Australia, menjelaskan mengapa pemerintahnya melarang Huawei dan ZTE menjual perangkat 5G. Sebagaimana dikutip oleh CNBC pada 12 Juli 2019, dapat ditemukan di sini: <https://www.cnbc.com/2019/03/28/malcolm-turnbull-on-australias-decision-to-ban-chinas-huawei-and-zte.html>.
- Hao, W.L. (2014). Australia dalam Strategi Besar China. University of California Press. Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei First to Complete IMT-2020 (5G) Promotion Group's Core Network Test for 5G Non-Standalone. Sebagaimana dikutip dari Berita Huawei pada tanggal 20 April 2021: <https://www.huawei.com/en/news/2018/4/IMT-2020-5G-Group-Core-Network-Test>.
- Huawei. Apa hubungan Huawei dengan pemerintah China? Sumber: Huawei Fact, 8 Februari 2021, <https://www.huawei.com/en/facts/question-answer/what-is-huaweis-relationship-with-the-chinese-government>.
- Kani, E. B. 2019 The China Challenge in 5G: Securing Our 5G Future: The Competitive Challenge and Considerations for U.S. Policy, 8

- Kemenkes.go.id (2020). Pertanyaan dan Jawaban Terkait Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19), Diakses dari kemenkes.id: https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA_Coronavirus_Updated_06032020.pdf, pada tanggal 1 April 2021.
- Liu et al. (2014). Australia dalam Strategi Besar China. *STUDI ASIAN* 54:2, 384–386.
- National Development and Reform Commission (NDRC) (2018, September). Retrieved from US China Business Council on April 17, 2021.
- Organisasi ASEAN. (2016, Oktober 3). Partnership Ekonomi Komprehensif Regional. Diakses dari Asosiasi Negeri Timur Asia: https://asean.org/?static_post=rcep-regional-full-economic-partnership pemerintah Australia (n.d.). Lihat hasil ChAFTA. Diakses dari Trade and Investment pada 8 Februari 2021 di <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/chafta/factsheets/Pages/chafta-outcomes-at-a-glance>.
- Reuters (2021, tanggal 12 Januari). Hukuman China terhadap batu bara Australia mendorong arus perdagangan untuk kembali berfungsi. Sumber: Intelligence Asia Australia China Coal (February 09, 2021): <https://www.mining.com/web/chinas-ban-on-australian-coal-forces-trade-flows-to-realign/#:~:text=China's imports from Australia have been at their lowest level since January 2015.&text=China's effective ban on imports, importers, and the two biggest exporters of China>.
- Reuters. (22 Februari 2019). Import batu bara Australia dilarang di pelabuhan China. Sebagaimana dikutip oleh New Crops Australia pada tanggal 12 Juli 2019, dapat ditemukan di sini: <https://www.news.com.au/finance/markets/australian-markets/china-port-bans-australian-coal-imports/news-story/322972b3ed0a1252d4ee4672012e7042> Scott Burchill, A. L.-S. teori hubungan internasional (edisi ketiga). PALGRAVE MACMILLAN di New York
- The Guardian (2020, March 13). The first COVID-19 case happened in November China government records show – report. Retrieved from Guardian.com on April 1, 2021, at <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>.
- Waltz, K. (1979). Teori Politik Internasional. Filipina: Addison-Wesley Publishing Company.
- Zhangbing Liu (2019). Current Status and Prospects for the Coal Industry Transition in China. Institute for Global Environmental Strategies.
- Zheng, C. (2019). Batu bara: Pergeseran Energi di China.